



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.**

**Fasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Fasal 2**

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
  - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang
  - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
  - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
  - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
  - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, FP dan PA Kabupaten Pemalang
  - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Teman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodah

- ih. Rancana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rancana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rancana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rancana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rancana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rancana Kerja Kecamatan Palosari
- nn. Rancana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rancana Kerja Kecamatan Watulumpul

**Fasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

**BUPATI PEMALANG,**

Cap  
Ttd

**MURTI AGUNG WIBOWO**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

Cap  
Ttd

**MOHAMAD ARIFIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PEMALANG





**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN 2021**



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG  
Jalan Alun-Alun Timur No. 4 Pemalang  
KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Tahun 2021 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2021 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Tahun 2021 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2021. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2021 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2021

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Tahun 2021,

semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pemalang, 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PEMALANG



SUHARTO, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP, 19620427 198603 1 010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
<b>Tahun 2021</b> .....	<b>12</b>
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan ....	12
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II.....	37
2.3 Penentuan Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi.....	40
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	64

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun 2021  
Sampai Dengan Triwulan II Dinas Perikanan Kabupaten  
Pemalang .....  
14
2. Tabel 2.2 Penjelasan Capaian Kinerja Keuangan Per Kegiatan  
Sampai Dengan Triwulan II Dinas Perikanan TA 2021 ..... 27
3. Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 39
4. Tabel 2.4 Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial Terkait  
Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan  
Kabupaten Pemalang ..... 40
5. Tabel 3.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020  
dan Perubahan Tahun 2020 .....  
46



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PERIKANAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050 / /2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG

[

- Menimbang : a. Adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* maka diperlukan Penyesuaian anggaran dan target kinerja Dinas Perikanan;
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 360 bahwa perangkat daerah menyusun rancangan perubahan renja perangkat daerah;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-

tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi awasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobagan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- 22 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
23. **Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Perubahan RENJA 2021 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2021

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

#### Pasal 3

Isi, Uraian dan perincian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pematang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang  
Pada tanggal,                    2021  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMATANG

**SUHARTO, S.IP., M.Si**  
NIP. 19620427 198603 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DISPERIK  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/ /2021  
TANGGAL : 2021

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Mengacu pada PMDN 86 th 2017 pasal 360 bahwa perangkat daerah menyusun rancangan perubahan renja perangkat daerah yang berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah Propinsi, Kabupaten / kota sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai upaya untuk menyesuaikan rencana kerja karena adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena *refocussing* anggaran untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) dan dampaknya

Selain itu adanya penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan ditahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 juga merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, dengan berpedoman pada Perubahan RKPD 2021 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021.

### **Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi awasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobagan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
  9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga harus ada perubahan Program, Kegiatan dan anggaran. Secara lebih rinci maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pematang adalah :

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan Kabupaten Pematang, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman kepada RKPD 2021 dan RPJMD Kabupaten Pematang tahun 2021 – 2026.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pematang.

- c. Sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021, serta merupakan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang ada

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk :

- a. untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan PD dan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya,
- b. memberikan gambaran tentang perubahan target capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2021 dan sebagai referensi arah dan pedoman dalam menyusun RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) Tahun 2021.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

### 2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2021

## BAB IV PENUTUP.

### **BAB II**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

### **2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan Kabupaten Pematang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang.

Dinas Perikanan Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Pematang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang dari 3 Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan hasil olahan perikanan telah dapat direalisasikan dengan sangat baik. Realisasi produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan

hasil perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perikanan**  
**Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI S/D TRIWULAN 11</b>	<b>%</b>
1	Produksi Perikanan Tangkap	KG	18.096.881	8.754.720	45,88
2	Produksi Perikanan Budidaya	KG	18.652.000	9.174.955	49,19
3	Produksi Hasil Olahan Perikanan	KG	11.360.484	4.733.535	41,67

- Produksi perikanan tangkap pada triwulan 1 sebesar 3.301.155 kg dan pada triwulan II sebesar 5.001.469 kg sehingga total produksi perikanan tangkap sampai dengan triwulan II sebesar 8.754.720 kg atau sebesar 45,88 % dari target produksi tahun 2021 sebesar 18.096.881 kg
- Produksi perikanan budidaya pada triwulan 1 sebesar 4.461.606 kg dan pada triwulan II sebesar 4.713.350 kg sehingga total produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan II sebesar 9.174.955 kg atau sebesar 49,19 % dari target produksi tahun 2021 sebesar 18.652.000 kg
- Realisasi produksi hasil olahan perikanan sampai dengan triwulan II sebesar 4.733.535 kg atau sebesar 41,67 % dari target produksi tahun 2021 sebesar 11.360.484 kg. rendahnya produksi hasil olahan perikanan sampai dengan triwulan 2 disebabkan

karena adanya pandemi corona yang menyebabkan permintaan hasil olahan perikanan di rest area, toko maupun tempat wisata menurun.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 Program, 20 kegiatan dan 54 sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari Visi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yaitu Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mengingat meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, maka Pemerintah menyatakan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nonalam.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan rasionalisasi anggaran sebanyak 4 tahap dimana Rasionalisasi Anggaran ini dikarenakan *refocussing* anggaran untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya. Anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang setelah mengalami Rasionalisasi Anggaran sebesar Rp 4.600.000.000,- atau sebesar 28,88 % dari anggaran penetapan sebesar Rp. 15.926.128.000,- menjadi Rp. 11.326.128.000,- anggaran tersebut di bagi menjadi belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah serta belanja modal. Target dan realisasi belanja daerah tersebut secara rinci dapat digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Belanja Daerah Dinas Perikanan**  
**Sampai dengan triwulan II Tahun 2021**

BELANJA DAERAH	Tahun Anggaran 2021			%
	Target Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Setelah Rasionalisasi (Rp)	Realisasi sampai TW II (Rp)	
<b>Belanja daerah</b>	<b>15.926.128.000</b>	<b>11.326.128.000</b>	<b>5.492.782.425</b>	<b>48,50</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>15.408.144.932</b>	<b>11.244.480.500</b>	<b>5.413.164.925</b>	<b>48,14</b>
Belanja Pegawai	5.424.598.000	5.031.178.000	2.491.804.375	49,53
Belanja Barang dan Jasa	6.437.110.982	4.202.542.200	1.944.704.150	46,27
Belanja Hibah	3.546.435.950	2.010.760.300	976.656.400	48,57
<b>Belanja Modal</b>	<b>517.983.068</b>	<b>81.647.500</b>	<b>79.617.500</b>	<b>97,51</b>
BM Peralatan dan Mesin	185.464.100	71.047.500	69.047.500	97,18
BM Gedung dan Bangunan	332.518.968	10.600.000	10.570.000	99,72

Sumber Dana yang diperoleh oleh dinas Perikanan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian DAU sebesar Rp.9.829.378.000,- dan DAK Penugasan Bidang kelautan dan perikanan sebesar RP. 1.496.750.000,- secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan Mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 9.829.378.000,- untuk membiayai 5 Program, 20 Kegiatan dan 54 sub kegiatan, realisasi DAU sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar

- Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan Mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan bidang kelautan perikanan sebesar Rp. 1.496.750.000,- meliputi 3 kegiatan yaitu pembangunan / rehabilitasi unit perbenihan (UPTD Kab / Kota), Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, Pengadaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, realisasi DAK sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 366.729.300,- atau 24,50 %. Realisasi keuangan DAK Baru sebesar 24,50 % namun demikian realisasi fisik mencapai 60 % hal ini disebabkan karena transfer DAK dari pusat dilakukan secara bertahap sehingga walaupun fisik sudah selesai tapi pembayaran belum bisa dilakukan.

Pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perikanan adalah Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat pelelangan ikan, dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Target dan realisasi PAD**  
**Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

Pendapatan	Tahun Anggaran 2021			
	Target Anggaran Penetapan (Rp)	Target Setelah Rasionalisasi (Rp)	Realisasi sampai dengan TW II (Rp)	(%)
Retribusi Jasa Usaha	2.050.000.000	2.050.000.000	1.297.967.835	63,32
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	30.000.000	7.209.500	24,03

Retribusi Tempat Pelelangan	2.020.000.000	2.020.000.000	1.290.758.335	63,90
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Realisasi retribusi jasa usaha sampai dengan triwulai II tahun 2021 sebesar 63,32% dengan rincian retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 24,03 % dan retribusi tempat pelelangan sebesar 63,90 % Capaian retribusi pemakaian kekayaan daerah belum mencapai 50 % hal ini disebabkan karena penerimaan bagi hasil tambak dinas akan diterima pada bulan September dan Desember.

Persandingan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas perikanan dapat dilihat dari persandingan program kegiatan Permendagri 13/2016 yang diubah menjadi permendagri 21 tahun 2011 dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.1**

**Persandingan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021**

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Program pengembangan perikanan tangkap	meningkatnya produksi perikanan tangkap	Kg	18.096.881	8.887.405.000	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase TPI yang memenuhi Standar	%	67	3.103.501.100	1.382.361.135	DISPERIK
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase TPI yang tertangani	%	100	1.404.501.100	266.940.135	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	terlaksananya pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap, sosialisasi, pembinaan				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	kali	5	70.000.000	25.906.400	
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	terlaksananya rehabilitasi sedang berat tempat pelelangan ikan, pemeliharaan dan pengecatan TPI sekabupaten, penambahan dermaga TPI Tanjungsari, pembangunan drainase lingkungan TPI Tanjungsari dan TPI Mojo, pembuatan				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	paket	11	1.334.501.100	241.033.735	
					<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana</b>	kegiatan	2	425.000.000	96.928.500	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	kali	7	225.000.000	96.928.500	
Gerakan bersih pantai	Terselenggaranya gerakan bersih pantai dan hari nusantara dan penanaman bibit cemara laut				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	kali	-	200.000.000	-	
					<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah pelaku perikanan yang terlayani</b>	jenis	2	1.099.000.000	882.539.000	
Pengembangan nelayan skala kecil					Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	kali	3	549.800.000	322.565.000	
					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	kali	15	549.200.000	559.974.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal</b>	jenis	2	175.000.000	95.953.500	
					Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	kali	6	175.000.000	95.953.500	
					<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase peningkatan pengawasan perairan umum daratan (PUD)</b>	%	4	<b>194.350.000</b>	<b>143.140.000</b>	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	dokumen	1	194.350.000	143.140.000	
pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan	terlaksananya pembinaan kelompok nelayan perairan umum, kegiatan restocking dan pengadaan alat tangkap ramah lingkungan dan keakutuhan kelembagaan kelompok				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	dokumen	1	194.350.000	143.140.000	
Pengendalian kerusakan ekosistem perairan	terlaksananya sosialisasi perda, pembuatan perbup dan penanaman cema-										

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
	ra laut										
<b>Program pengembangan perikanan budidaya</b>	<b>meningkatnya produksi perikanan budidaya</b>	<b>Kg</b>	<b>18.652.000</b>	<b>1.682.100.000</b>	<b>Program pengelolaan perikanan budidaya</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Budi-daya yang tertangani</b>	<b>%</b>	<b>5,21</b>	<b>3.376.496.000</b>	<b>2.104.409.400</b>	<b>DISPERIK</b>
Pengembangan bibit ikan unggul	Peningkatan ketersediaan sarana produksi UBIAT dan UPR serta penyediaan induk unggul				<b>Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dibina</b>	<b>orang</b>	<b>105</b>	602.200.000	249.202.175	
pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pada kelompok pembudidaya ikan, PKK, TMMD dan Posdaya KKN				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	kegiatan	3	33.000.000	10.000.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya iakn	Terlaksananya kegiatan pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan program dan operasional pokja sertifikat Hak Atas Tanah				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	kelompok	5	50.500.000	25.733.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pelatihan budidaya perikanan	Terlaksananya pelatihan serta magang dan bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	kelompok	5	429.100.000	178.732.175	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan	data	3	2.774.296.000	1.855.207.225	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pendampingan pada kelompok petani pembudidaya ikan	Terlaksananya kegiatan pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan program dan operasional pokja sertifikat Hak Atas Tanah				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	dokumen	1	40.000.000	20.798.000	
Pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	kegiatan	13	2.087.246.000	1.370.346.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pengembangan kawasan minapolitan					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	jenis	2	100.000.000	25.000.400	
Pengembangan bibit ikan unggul					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	paket	1	497.050.000	411.863.000	
Rehabilitasi kawasan budidaya					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	kegiatan	2	50.000.000	27.199.825	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar</b>	<b>prosentase sarpras kawasan minapolitan yang memadai</b>	%	<b>100</b>	<b>989.100.000</b>							<b>DISPERIK</b>
Rehabilitasi kawasan budidaya					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	kegiatan	2	<b>50.000.000</b>	<b>27.199.825</b>	
Pengembangan/pembuatan demplot kolam air payau dan air tawar					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	kelompok	5	429.100.000	<b>178.732.175</b>	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pengembangan kawasan minapolitan					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	jenis	2	100.000.000	25.000.400	
<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>Tercapainya usaha pengelolaan ikan yang dibina</b>	<b>kegiatan</b>	<b>31</b>	<b>1.852.450.000</b>	<b>Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>	<b>persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan</b>	<b>%</b>	<b>3,45</b>	<b>1.345.300.000</b>	<b>774.165.000</b>	<b>DISPERIK</b>
					Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah data dan informasi poklaksar	data	3	328.450.000	182.858.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pembinaan dalam rangka sertifikasi usaha budidaya dan hasil tangkapan perikanan	terlaksananya fasilitasi kelompok pengolahan dan pemasar yang belum memiliki badan hukum dan sertifikasi halal dari MUI dan pembinaan				Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	sampel	150	328.450.000	182.858.000	
					<b>Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</b>	<b>Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana</b>	kegiatan	1	<b>301.200.000</b>	<b>199.756.000</b>	
Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar	jumlah peserta pengolah dan pemasar yang dibina				Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	kelompok	6	301.200.000	199.756.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	terlaksana peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir										
Apresiasi teknologi pengolahan produk nilai tambah	jumlah orang yang mengikuti pelatihan pangan industri rumah tangga, teknologi produk nilai tambah hasil perikanan										
Intensifikasi pembinaan mutu hasil perikanan	terlaksananya uji sampel perikanan dan penyedia alat test kit formalin, rodamin kit dan borak kit										

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	kegiatan	3	715.650.000	391.551.000	
Promosi gemar makan ikan	terlaksananya lomba masak ikan tingkat kabupaten dan provinsi serta sosialisasi gemar makan ikan untuk ibu hamil				Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	kegiatan	2	357.802.000	237.905.000	
Promosi pemasaran hasil perikanan	Jumlah event pameran yang diikuti				Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	event	6	357.848.000	153.646.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan	terlaksanannya pembangunan/rehabilitasi sarpras bagi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
						Nilai Sakip, Indeks RB dan Indeks kepuasan masyarakat			<b>7.906.480.900</b>	<b>6.922.052.465</b>	
					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya</b>	%	100	<b>185.648.000</b>	<b>149.089.500</b>	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	3	133.250.000	115.264.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA skpd yang disusun	dokumen	1	10.450.000	6.732.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	dokumen	1	10.113.000	6.395.500	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	dokumen	1	11.685.000	7.982.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA skpd yang disusun	dokumen	1	10.150.000	6.432.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	dokumen	2	10.000.000	6.282.500	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	5.426.921.600	5.035.814.100	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	orang	38	5.029.378.000	5.029.378.000	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	orang	23	387.120.000	-	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	5	7.400.000	3.412.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	laporan	2	3.023.600	3.023.600	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselesaikan</b>	%	100	<b>16.000.000</b>	<b>10.800.000</b>	
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	kali	12	16.000.000	10.800.000	
					<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselesaikan</b>	%	100	<b>10.000.000</b>	<b>8.188.000</b>	
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	dokumen	1	10.000.000	8.188.000	
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah</b>	%	100	<b>213.674.000</b>	<b>144.466.000</b>	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	laporan	-	16.000.000	-	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	kegiatan	2	197.674.000	144.466.000	
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah</b>	%	100	<b>811.009.200</b>	<b>571.520.365</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	paket	1	24.997.500	14.984.150	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	5	8.434.100	8.434.100	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	paket	1	149.342.600	115.337.466	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	paket	1	262.575.000	249.745.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	jenis	1	12.695.000	9.720.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	kali	240	352.965.000	173.299.649	
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	jenis	3	<b>154.768.100</b>	<b>34.351.500</b>	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	jenis	-	33.815.000	-	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur yang memadai				Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	set	1	11.226.000	5.613.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	buah	17	103.727.100	28.738.500	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	set	-	6.000.000	-	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	jenis	3	<b>763.780.000</b>	<b>769.980.000</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat	500	9.300.000	15.500.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	rekening	4	122.400.000	122.400.000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	orang	34	632.080.000	632.080.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor											
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	jenis	3	<b>294.180.000</b>	<b>197.843.000</b>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	kendaraan	54	75.385.000	75.843.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	25	47.580.000	39.400.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	gedung	2	171.215.000	82.600.000	

Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran (Rp)	Program	Indikator	Satuan	Target 2021	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	OPD
					Penataan Organisasi	prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	%	-	30.500.000	-	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	laporan	-	14.500.000	-	
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	kali	-	16.000.000	-	





## **2.2.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021**

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan per kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya secara ringkas dapat dijabarkan dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Penjelasan Capaian Kinerja Keuangan Per Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II**  
**Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021**

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
<b>4</b>					<b>Pendapatan Daerah</b>	2.050.000.000	2.050.000.000	1.297.967.835	63,32	ST
4	1				Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.050.000.000	2.050.000.000	1.297.967.835	63,32	ST
4	1	2			Retribusi Daerah	2.050.000.000	2.050.000.000	1.297.967.835	63,32	ST
4	1	2	14		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	30.000.000	7.209.500	24,03	R
4	1	2	16		Retribusi Tempat Pelelangan	2.020.000.000	2.020.000.000	1.290.758.335	63,90	ST
<b>Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung</b>						<b>15.926.128.000</b>	<b>11.326.128.000</b>	<b>5.492.782.425</b>	<b>48,49</b>	<b>ST</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.906.480.900</b>	<b>6.922.052.465</b>	<b>2.899.944.725</b>	41,89	T
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>185.648.000</b>	<b>149.089.500</b>	<b>73.335.000</b>	49,19	ST
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.250.000	115.264.000	65.879.000	57,15	ST

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.450.000	6.732.500	3.168.000	47,06	T
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.113.000	6.395.500	-	0,00	SR
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.685.000	7.982.500	-	0,00	SR
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.150.000	6.432.500	-	0,00	SR
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	6.282.500	4.288.000	68,25	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.426.921.600</b>	<b>5.035.814.100</b>	<b>2.494.941.875</b>	49,54	ST
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.029.378.000	5.029.378.000	2.491.804.375	49,54	ST
3	25	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	387.120.000	-	-	0,00	SR
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.400.000	3.412.500	2.912.500	85,35	ST
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.023.600	3.023.600	-	0,00	SR

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.000.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>225.000</b>	2,08	SR
3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000	10.800.000	225.000	2,08	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.188.000</b>	-	0,00	SR
3	25	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	8.188.000	-	0,00	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>213.674.000</b>	<b>144.466.000</b>	<b>99.442.000</b>	68,83	ST
3	25	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.000.000	-	-	0,00	SR
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.674.000	144.466.000	99.442.000	68,83	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>811.009.200</b>	<b>571.520.365</b>	<b>114.080.400</b>	19,96	SR
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.997.500	14.984.150	1.747.500	11,66	SR
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.434.100	8.434.100	-	0,00	SR

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
3	25	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.342.600	115.337.466	31.934.200	27,69	R
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	262.575.000	249.745.000	3.765.200	1,51	SR
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.695.000	9.720.000	4.050.000	41,67	T
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.965.000	173.299.649	72.583.500	41,88	T
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>154.768.100</b>	<b>34.351.500</b>	<b>32.351.500</b>	94,18	ST
3	25	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.815.000	-	-	0,00	SR
3	25	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	11.226.000	5.613.000	5.613.000	100,00	ST
3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.727.100	28.738.500	26.738.500	93,04	ST
3	25	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	-	-	0,00	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>763.780.000</b>	<b>769.980.000</b>		0,00	SR
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000	15.500.000	2.578.000	16,63	SR
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.400.000	122.400.000	49.608.650	40,53	T

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.080.000	632.080.000	284.500.000	45,01	T
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294.180.000</b>	<b>197.843.000</b>	<b>85.568.950</b>	43,25	T
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.385.000	75.843.000	21.507.450	28,36	R
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.580.000	39.400.000	13.120.000	33,30	R
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.215.000	82.600.000	50.941.500	61,67	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>30.500.000</b>	-	-	0,00	SR
3	25	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14.500.000	-	-	0,00	SR
3	25	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16.000.000	-	-	0,00	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.103.501.100</b>	<b>1.382.361.135</b>	<b>746.378.700</b>	53,99	ST

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.404.501.100</b>	<b>266.940.135</b>	<b>203.314.500</b>	76,16	ST
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	70.000.000	25.906.400	11.493.000	44,36	T
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.334.501.100	241.033.735	191.821.500	79,58	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,02</b>		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>425.000.000</b>	<b>96.928.500</b>	<b>38.112.300</b>	39,32	T
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	225.000.000	96.928.500	38.112.300	39,32	T
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	200.000.000	-	-	0,00	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>1.099.000.000</b>	<b>922.539.000</b>	<b>459.609.100</b>	49,82	ST
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	549.800.000	322.565.000	122.611.000	38,01	T

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Semester Pertama	%	Status
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	549.200.000	599.974.000	336.998.100	56,17	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,04</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>175.000.000</b>	<b>95.953.500</b>	<b>45.342.800</b>	47,25	T
3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	175.000.000	95.953.500	45.342.800	47,25	T
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>3.376.496.000</b>	<b>2.104.409.400</b>	<b>922.264.350</b>	43,83	T
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2,02</b>		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>602.200.000</b>	<b>249.202.175</b>	<b>79.228.300</b>	31,79	S
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	89.600.000	34.737.000	30.621.000	88,15	ST
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	33.000.000	10.000.000	-	0,00	SR
<b>Kode Rekening</b>					<b>Program/Kegiatan/Sub</b>	<b>Jumlah Ang-</b>	<b>Jumlah Ang-</b>	<b>Realisasi Se-</b>	<b>%</b>	<b>Status</b>

					<b>Kegiatan</b>	<b>garan Penetapan (Rp)</b>	<b>garan Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>mester Pertama</b>		
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.500.000	25.733.000	2.121.300	8,24	SR
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	429.100.000	178.732.175	46.486.000	26,01	R
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2,04</b>		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>2.774.296.000</b>	<b>1.855.207.225</b>	<b>843.036.050</b>	45,44	T
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	20.798.000	12.878.000	61,92	ST
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.087.246.000	1.370.346.000	636.160.300	46,42	T
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	25.000.400	25.000.400	100,00	ST
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	497.050.000	411.863.000	168.997.350	41,03	T
<b>Kode Rekening</b>					<b>Program/Kegiatan/Sub</b>	<b>Jumlah Ang-</b>	<b>Jumlah Ang-</b>	<b>Realisasi Se-</b>	<b>%</b>	<b>Status</b>

					<b>Kegiatan</b>	<b>garan Penetapan (Rp)</b>	<b>garan Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>mester Pertama</b>		
3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	50.000.000	27.199.825	-	0,00	SR
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>194.350.000</b>	<b>143.140.000</b>	<b>117.917.000</b>	82,38	ST
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>194.350.000</b>	<b>143.140.000</b>	<b>117.917.000</b>	82,38	ST
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	194.350.000	143.140.000	117.917.000	82,38	ST
<b>Kode Rekening</b>					<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)</b>	<b>Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi Semester Pertama</b>	<b>%</b>	<b>Status</b>

3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1.345.300.000</b>	<b>774.165.000</b>	<b>469.816.000</b>	60,69	ST
3	25	06	2,01		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>328.450.000</b>	<b>182.858.000</b>	<b>99.525.500</b>	54,43	ST
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	328.450.000	182.858.000	99.525.500	54,43	ST
3	25	06	2,02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>301.200.000</b>	<b>199.756.000</b>	<b>90.008.000</b>	45,06	T
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	301.200.000	199.756.000	90.008.000	45,06	T
<b>Kode</b>					<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran Penetapan (Rp)</b>	<b>Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi Semester Pertama</b>	<b>%</b>	<b>STATUS</b>

<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2,03</b>		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>715.650.000</b>	<b>391.551.000</b>	<b>280.282.500</b>	71,58	ST
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	357.802.000	237.905.000	153.066.500	64,34	ST
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	357.848.000	153.646.000	127.216.000	82,80	ST



Berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

NO	Interval nilai realisasi kinerja / kriteria penilaian realisasi kinerja	Status
1	47,50 % ≤	Sangat Tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 % ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perikanan sampai dengan tanggal 30 Juni (TW II) sebesar Rp. 5.492.782.425,- atau sebesar 48,49 % dari total anggaran setelah refocusing ke 2 sebesar Rp. 11.326.128.000,-, hal ini berarti penyerapan anggaran pada Dinas perikanan dengan status sangat tinggi (ST) hal ini disebabkan karena Adanya kegiatan musrenbang bidang kelautan dan perikanan hal tersebut memudahkan dalam perencanaan sehingga antara target dan realisasi dapat tercapai

Dari 5 program yang dikelola dinas perikanan terdapat 3 program dengan status penyerapan anggaran sangat tinggi (ST) yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sedangkan 2 program lainnya yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota dan program pengelolaan perikanan budidaya dengan status penyerapan anggaran tinggi (T) faktor pendorong yang menyebabkan tingginya penyerapan anggaran pada Dinas Perikanan antara lain :

- Sebelum adanya refocusing pada awal tahun telah dibayarkan jasa konsultasi perencanaan kegiatan fisik dan sosialisasi kegiatan fisik

- Pekerjaan kontraktual sudah selesai dilaksanakan pada semester pertama

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan mengelola 5 Program yang terbagi menjadi 20 kegiatan dan 54 sub kegiatan. dari 54 sub kegiatan tersebut terdapat 31 sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih dibawah target 50% dan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD , realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini sebesar 0 % hal ini disebabkan karena penyusunan Dokumen Perubahan RKA akan dilaksanakan semester 2.
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD , realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini sebesar 0 % hal ini disebabkan karena penyusunan DPA tahun 2022 akan dilaksanakan semester 2.
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD , realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini sebesar 0 % hal ini disebabkan karena penyusunan Perubahan DPA akan dilaksanakan semester 2.
4. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN, realisasi sub kegiatan ini sebesar 0 % karena anggaran difocusing 100 %.
5. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, realisasi sub kegiatan ini masih 0 % karena penyusunan laporan semesteran akan dilaksanakan pada bulan Juli
6. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, realisasi sub kegiatan ini 2,08 % karena akan dilaksanakan semester 2
7. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah,realisasi sub kegiatan ini 0 % karena kegiatan akan dilaksanakan semester 2

8. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, realisasi sub kegiatan ini 0 karena anggaran difocusing 100 %
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor realisasi anggaran sampai dengan triwulan II kegiatan ini sebesar 11,66 % hal ini disebabkan karena kegiatan bersifat insidental dan tidak bisa diprediksi
10. Penyediaan peralatan rumah tangga, realisasi sub kegiatan ini 0 % karena akan dilaksanakan TW III
11. Penyediaan bahan logistic kantor, realisasi sub kegiatan ini 27,69 % karena SPJ Bulan Juni sedang dalam proses
12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi sub kegiatan ini 1,51 % karena SPJ sedang dalam proses
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, realisasi sub kegiatan ini 41,67 karena SPJ sedang dalam proses
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi sub kegiatan ini 41,88% hal ini karena adanya PPKM, sehingga SPPD tidak terserap
15. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, realisasi sub kegiatan ini 0 karena anggaran difocusing 100%
16. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya, realisasi sub kegiatan ini 0 karena anggaran difocusing 100%
17. Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi sub kegiatan ini 16,63 % karena bersifat insidental dan tidak bisa diprediksi
18. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik, realisasi sub kegiatan ini 40,57 karena anggaran bersifat antisipatif, menunggu tagihan dari PLN, PDAM dan Telkom
19. Penyediaan jasa layanan umum kantor, realisasi kegiatan ini 45,01 % karena SPJ Bulan Juni sedang dalam proses

20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan, realisasi sub kegiatan ini 28,36 % hal ini disebabkan karena kegiatan bersifat insidental dan tidak bisa diprediksi.
21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi sub kegiatan ini 33,30% hal ini disebabkan karena kegiatan bersifat insidental dan tidak bisa diprediksi.
22. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, realisasi sub kegiatan ini 44,36 %, hal ini disebabkan karena penyerapan SPPD tidak maksimal karena adanya PPKM Darurat
23. Pengembangan Kapasitas nelayan kecil, realisasi sub kegiatan ini 39,32 % karena adanya covid-19 sehingga kegiatan pembinaan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
24. Pelayanan penerbitan Tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT, realisasi sub kegiatan ini 47,25 % karena SPJ bulan Juni sedang dalam proses
25. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil, realisasi sub kegiatan ini masih 0 % karena fasilitasi akan dilaksanakan setelah PPKM Darurat
26. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha, realisasi sub kegiatan ini masih 8,24 % karena fasilitasi akan dilaksanakan setelah PPKM Darurat
27. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, realisasi sub kegiatan ini 26,01 % karena pencairan DAK pertermin menunggu transfer dari pusat dan tahap II baru di transfer bulan Juli

28. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota, realisasi sub kegiatan ini 46,42 % karena pencairan menunggu tahapan penyelesaian pekerjaan fisik
29. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten (kota), realisasi kegiatan ini 41,03 % karena pertemuan pembinaan CBIB menunggu situasi pandemi membaik dan berakhirnya PPKM Darurat
30. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan didarat, realisasi sub kegiatan ini masih 0 karena penyusunan dokumen lingkungan menunggu jadwal kegiatan cluster vaname (APBN)
31. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, realisasi sub kegiatan ini 45,06 % karena pelaksanaan kegiatan bimbingan akan dilaksanakan Tw III.

### **2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya menjadi langkah awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya, didasarkan pula pada evaluasi terhadap situasi dan kondisi sektor perikanan di Kabupaten Pematang Jaya, permasalahan dan isu dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 serta didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang antara lain :

**Tabel**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	<b>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BELUM OPTIMAL DAN KURANG MERATA</b>		
1	Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Pendangkalan muara yang menyebabkan kesulitan keluar masuk kapal perikanan
			Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
			Degradasi lingkungan dan penurunan mutu lingkungan perairan umum
			Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian ekosistem perairan umum
			Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan tangkap
			Terbatasnya SDM penyuluh perikanan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Belum memadainya infrastruktur sarana prasarana perikanan budidaya
			Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air untuk budidaya perikanan
			Penguasaan teknologi budidaya perikanan yang masih rendah
			Belum optimalnya pelaksanaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
			Belum optimalnya penanganan serangan penyakit dan bencana alam

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	<b>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BELUM OPTIMAL DAN KURANG MERATA</b>		
			Naiknya biaya produksi tidak sebanding dengan naiknya harga jual
			Ketersediaan benih ikan yang belum memadai
			Terbatasnya SDM penyuluh perikanan
			Belum terfasilitasinya budidaya dan pemasaran ikan hias
			Belum optimalnya pengembangan mina wisata untuk mendukung program Dewi (Desa Wisata)
		Belum optimalnya standarisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktivitas pelelangan ikan
			Belum optimalnya retribusi TPI karena masih adanya pemasaran produk tangkapan yang tidak melalui TPI
		Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Beragamnya produk pangan sumber protein sebagai produk substitusi ikan
			Harga ikan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein lainnya
			Kurangnya promosi gemar makan ikan dan promosi produk perikanan
			Kurangnya inovasi pengolahan produk perikanan
		Masih rendahnya unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	Belum optimalnya penerapan cara pengolahan ikan yang sesuai standar higienis
			Belum optimalnya pembinaan kelompok pengolah dan pemasar
			Belum ada produk olahan hasil perikanan yang tersertifikasi

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang, visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR,  
AGAMIS DAN NGANGENI"**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dominan terdapat dalam **Misi ke lima** yaitu :

**“Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan, penguatan sektor pariwisata serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Perikanan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perikanan .

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai upaya untuk menyesuaikan rencana kerja karena adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena *refocussing* anggaran untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya

Selain itu adanya penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan ditahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 juga merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, dengan berpedoman pada Perubahan RKPD 2021 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021.

Rumusan Perubahn rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kode	Uru- san/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Pro- gram/Kegiata n/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Pro- gram/Kegiata n/Sub Kegiatan (Pe- rubahan)	Satu- an	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih		OPD	Alasan Pe- rubahan	
					Peneta- pan	Peru- bahan	Penet- apan	Peru- ruba- han	Ber- tam- bah/ (Ber- ku- rang ) (Rp)	%			
3													
3	2												
3	2	0						7.906.480.900	6.922.052.465	984.428.435	12,5	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		%	100	100	185.648.000	149.089.500	36.558.500	19,7	Dis- perik	Refocussing anggaran

						kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya									
3	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	3	3	133.250.000	115.264.000	17.986.000	13,5	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA skpd yang disusun	Jumlah RKA skpd yang disusun	dokumen	1	1	10.450.000	6.732.500	3.717.500	35,6	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	dokumen	1	1	10.113.000	6.395.500	3.717.500	36,8	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	dokumen	1	1	11.685.000	7.982.500	3.702.500	31,7	Disperik	Refocussing anggaran

3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA skpd yang disusun	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA skpd yang disusun	dokumen	1	1	10.15 0.000	6.43 2.50 0	3.71 7.50 0	36,6	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	dokumen	2	2	10.00 0.000	6.28 2.50 0	3.71 7.50 0	37,2	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah</b>	%	100	100	<b>5.426. 921.6 00</b>	<b>5.03 5.81 4.10 0</b>	391. 107. 500	7,2	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	orang	38	38	5.029. 378.0 00	5.02 9.37 8.00 0	-	0,0	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	orang	23	0	387.1 20.00 0	-	387. 120. 000	100,0	Dis- perik	Refocussing anggaran

3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	5	5	7.400.000	3.412.500	3.987.500	53,9	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan-lan-Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	laporan	2	2	3.023.600	3.023.600	-	0,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara</b>	<b>Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara</b>	%	100	100	<b>16.000.000</b>	<b>10.800.000</b>	5.200.000	32,5	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	kali	12	6	16.000.000	10.800.000	5.200.000	32,5	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara</b>	%	100	100	<b>10.000.000</b>	<b>8.188.000</b>	1.812.000	18,1	Disperik	Refocussing anggaran

3	2	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	dokumen	1	1	10.00 0.000	8.18 8.00 0	1.81 2.00 0	18,1	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah</b>	%	100	100	<b>213.6 74.00 0</b>	<b>144. 466. 000</b>	69.2 08.0 00	32,4	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	laporan	12	-	16.00 0.000	-	16.0 00.0 00	100,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	kegiatan	2	2	197.6 74.00 0	144. 466. 000	53.2 08.0 00	26,9	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kelancaran administrasi</b>	<b>Prosentase kelancaran administrasi</b>	%	100	100	<b>811.0 09.20 0</b>	<b>571. 520. 365</b>	239. 488. 835	29,5	Disperik	Refocussing anggaran

			6			umum perangkat daerah	umum perangkat daerah									
3	2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	paket	1	1	24.99 7.500	14.9 84.1 50	10.0 13.3 50	40,1	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	5	5	8.434. 100	8.43 4.10 0	-	0,0	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	paket	1	1	149.3 42.60 0	115. 337. 466	34.0 05.1 34	22,8	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	paket	1	1	262.5 75.00 0	249. 745. 000	12.8 30.0 00	4,9	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan pe-	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan pe-	jenis	1	1	12.69 5.000	9.72 0.00 0	2.97 5.00 0	23,4	Dis- perik	Refocussing anggaran

						rundangan-undangan yang dibeli	rundangan-undangan yang dibeli									
3	2	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	kali	240	160	352.965.000	173.299.649	179.665.351	50,9	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	jenis	3	3	<b>154.768.100</b>	<b>34.351.500</b>	120.416.600	77,8	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	jenis	1	-	33.815.000	-	33.815.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	Jumlah mebeuler yang dibeli	set	2	1	11.226.000	5.613.000	5.613.000	50,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	buah	17		103.727.100	28.738.500	74.988.600	72,3	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	set	1	-	6.000.000	-	6.000.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran

						lainnya yang dibangun	lainnya yang dibangun										
3	2	0	2			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	jenis	3	3	<b>763.780.000</b>	<b>769.980.000</b>	-6.200.000	-0,8	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Jumlah surat yang terkirim	surat	500	500	9.300.000	15.500.000	-6.200.000	-66,7	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	rekening	4	4	122.400.000	122.400.000	-	0,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	Jumlah SDM non pns setiap bulan	orang	34	34	632.080.000	632.080.000	-	0,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	jenis	3	3	<b>294.180.000</b>	<b>197.843.000</b>	96.337.000	32,7	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan	54	54	75.385.000	75.843.000	-458.000	-0,6	Disperik	Refocussing anggaran

					daraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang berizin dan dipelihara	yang berizin dan dipelihara									
3	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	25	25	47.580.000	39.400.000	8.180.000	17,2	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	gedung	2	2	171.215.000	82.600.000	88.615.000	51,8	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>prosentase dukungan terhadap penataan organisasi</b>	<b>prosentase dukungan terhadap penataan organisasi</b>	%	100	-	<b>30.500.000</b>	-	30.500.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	laporan	4	-	14.500.000	-	14.500.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan	kali	12	-	16.000.000	-	16.000.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran

						yanan publik dan tata laksana yang terlaksana	lik dan tata laksana yang terlaksana										
3	2	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>Prosentase TPI yang memenuhi standar</b>	%	18.096.881 kg	67	<b>3.103.501.100</b>	<b>1.382.361.135</b>	1.72 1.13 9.96 5	55,5	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya data sumber daya ikan dan terpeliharanya fasilitas tempat pelelangan ikan</b>	<b>Persentase TPI yang tertangani</b>	%	100	100	<b>1.404.501.100</b>	<b>266.940.135</b>	1.13 7.56 0.96 5	81,0	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	kali	5	5	70.00 0.000	25.9 06.4 00	44.0 93.6 00	63,0	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	paket	14	11	1.334. 501.1 00	241. 033. 735	1.09 3.46 7.36 5	81,9	Dis-perik	Refocussing anggaran

3	2	0	2		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana</b>	kegiatan	2	2	<b>425.000.000</b>	<b>96.928.500</b>	328.071.500	77,2	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	kali	7	7	225.000.000	96.928.500	128.071.500	56,9	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	kali	1	-	200.000.000	-	200.000.000	100,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan TPI</b>	<b>Jumlah pelaku perikanan yang terlayani</b>	jenis	2	2	<b>1.099.000.000</b>	<b>922.539.000</b>	176.461.000	16,1	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate,	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah	kali	3	3	549.800.000	322.565.000	227.235.000	41,3	Disperik	Refocussing anggaran

						jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)									
3	2	0	2	0	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	kali	15	15	549.200.000	599.974.000	-50.774.000	-9,2	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabu-</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal</b>	jenis	2	2	<b>175.000.000</b>	<b>95.953.500</b>	79.046.500	45,2	Disperik	Refocussing anggaran

					<b>paten/Kota</b>											
3	2	0	2	0	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendaftaran kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	Jumlah pendaftaran kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	kali	6	6	175.000.000	95.953.500	79.046.500	45,2	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI-DAYA</b>	<b>Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani</b>	%	18.167.140 Kg	3%	<b>3.376.496.000</b>	<b>2.104.409.400</b>	1.272.086.600	37,7	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitas bantuan pendanaan dan pem-</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dibina</b>	orang	105	105	<b>602.200.000</b>	<b>249.202.175</b>	352.997.825	58,6	Disperik	Refocussing anggaran

						<b>berian kemudahan akses IPTEK serta pendidikan dan pelatihan</b>										
3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	kali	8	8	89.60 0.000	34.7 37.0 00	54.8 63.0 00	61,2	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	kegiatan	3	3	33.00 0.000	10.0 00.0 00	23.0 00.0 00	69,7	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	kelompok	5	5	50.50 0.000	25.7 33.0 00	24.7 67.0 00	49,0	Disperik	Refocussing anggaran

					Usaha	kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan									
3	2	0	2	0	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	kelompok	5	5	429.100.000	178.732.175	250.367.825	58,3	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah aktivitas pengelolaan</b>	<b>Jumlah aktivitas pengelolaan pem-</b>	aktivitas	3	3	<b>2.774.296.000</b>	<b>1.855.207.22</b>	919.088.775	33,1	Disperik	Refocussing anggaran

			4			pembudidaya ikan	budidaya ikan				5					
3	2	0	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	doku men	1	1	40.00 0.000	20.7 98.0 00	19.2 02.0 00	48,0	Dis- perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kujungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, De-	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kujungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Blendung, De-	kegiat an	13	13	2.087. 246.0 00	1.37 0.34 6.00 0	716. 900. 000	34,3	Dis- perik	Refocussing anggaran

						sa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	sa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan									
3	2	0	2	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	jenis	2	2	100.000.000	25.000.400	74.999.600	75,0	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan	paket	1	1	497.050.000	411.863.000	85.187.000	17,1	Disperik	Refocussing anggaran

						perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia									
3	2	0	2	0	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	kegiatan	2	2	50.00 0.000	27.1 99.8 25	22.8 00.1 75	45,6	Dis- perik	Refocussing anggaran
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN</b>	<b>Persentase peningkatan pengawasan perairan</b>	<b>Persentase peningkatan pengawasan perairan</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>194.3 50.00 0</b>	<b>143. 140. 000</b>	51.2 10.0 00	26,3	Dis- perik	Refocussing anggaran

					<b>PERIKANAN</b>	<b>umum daratan (PUD)</b>	<b>umum daratan (PUD)</b>									
3	2	0	2		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan</b>	<b>Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan</b>	dokumen	1	1	<b>194.350.000</b>	<b>143.140.000</b>	51.210.00	26,3	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	dokumen	1	1	194.350.000	143.140.000	51.210.00	26,3	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Peningkatan Angka Konsumsi Ikan</b>	<b>Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan</b>	Kg	2,5	5	<b>1.345.300.000</b>	<b>774.165.000</b>	571.135.000	42,5	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah data dan informasi poklarsar</b>	<b>Jumlah data dan informasi poklarsar</b>	data	3	3	<b>328.450.000</b>	<b>182.858.000</b>	145.592.000	44,3	Disperik	Refocussing anggaran

3	2	0	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	ke-lompok	11	11	328.450.000	182.858.000	145.592.000	44,3	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana</b>	<b>Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana</b>	kegiatan	1	1	<b>301.200.000</b>	<b>199.756.000</b>	101.444.000	33,7	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	ke-lompok	6	6	301.200.000	199.756.000	101.444.000	33,7	Dis-perik	Refocussing anggaran
3	2	0	2		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan</b>	kegiatan	3	3	<b>715.650.000</b>	<b>391.551.000</b>	324.099.000	45,3	Dis-perik	Refocussing anggaran

3	2	0	2	0	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terse-lenggara	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terse-lenggara	kegiatan	2	2	357.802.000	237.905.000	119.897.000	33,5	Disperik	Refocussing anggaran
3	2	0	2	0	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	event	6	1	357.848.000	153.646.000	204.202.000	57,1	Disperik	Refocussing anggaran



#### **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2021 ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perikanan dan sebagai penjabaran dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021, serta merupakan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 memuat, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dimana Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya / anggaran yang tersedia. Sebagai konsekuensinya diperlukann langkah – langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perikanan Tahun 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Tahun 2021.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 agar dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Perubahan RKA dan pelaksanaan program dan kegiatan .

Pemalang, 2020

  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG  
DISPERIK  
SUHARTO, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP, 19620427 198603 1 010